

**STRUKTUR AGENSI PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LORONG WISATA**

(Kasus Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar)

***STRUCTURE OF GOVERNMENT AGENCY IN COMMUNITY EMPOWERMENT
THROUGH THE TOURIST ALWAYS PROGRAM***

(Case Of The Sambung Jawa Village, Mamajang District, Makassar City)

SKRIPSI

REONALDI HAIRUDDIN

E031191028



PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**STRUKTUR AGENSI PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LORONG WISATA
(Kasus Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar)**

SKRIPSI

REONALDI HAIRUDDIN

E031191028



SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN

SOSIOLOGI

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRUKTUR AGENSI PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
LORDONG WISATA (Kasus Kelurahan Sambung Jawa,
Kecamatan Marajang, Kota Makassar)

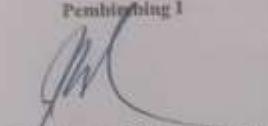
NAMA : REONALDI HAIRUDDIN

NIM : E031191028

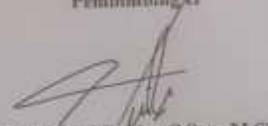
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
NIP. 19700513 199702 1 002

Pembimbing II


Harishari Rahim, S.Sos., M.Si
NIP. 19840907 202107 3 001

Mengetahui,


Kepala Departemen Sosiologi
FISIP UNHAS

Prof. Hashbi Marissanpan, M. Si., Ph. D
NIP. 19630827 199103 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh :

NAMA : REONALDI HAIRUDDIN
NIM : E031191028
JUDUL : STRUKTUR AGENSI PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
LORONG WISATA (Kasus Kelurahan Sambung Jawa,
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar)

Pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 08 September 2023

Tempat: Ruang Rapat Departemen Sosiologi

Tim Evaluasi Skripsi

Ketua : Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
Sekretaris : Hariashari Rahim, S.Sos., M.Si
Anggota : Dr. Muhi. Iqbal Latief, M.Si
Dr. Ria Renita Abbas, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : REONALDI HAIRUDDIN
NIM : E031191028
JUDUL : STRUKTUR AGENSI PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
LORONG WISATA (Kasus Kelurahan Sambung Jawa,
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 September 2023



Reonaldi Hairuddin

HALAMAN PERSEMBAHAN

“kita perlu tahu bahwa tidak semua ikan bisa tumbuh dan berkembang pada habitat yang sama, mereka butuh tempat berbeda karena mereka punya kebutuhan yang berbeda”

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang punya kuasa atas perubahan, juga bagi mereka yang semestinya beradaptasi atas perkembangan zaman.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya dan hidayanya lah sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai dengan tema “**Struktur Agensi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lorong Wisata (Kasus Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar)**”. sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada baginda nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa ummat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman kepandaian seperti hari ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir perkuliahan dan harapan peneliti semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi proposal penelitian agar menjadi lebih baik lagi.

Penulis juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Dr. Phill Sukri, M.Si selaku Dekan FISIP UNHAS.
3. Prof hasbi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Departemen Sosiologi
4. Pembimbing akademik Dr. Rahmat Muhammad, M.Si dan Hariashari Rahimm, S. Sos., M.Si yang telah membimbing penulis selama masa penyusunan skripsi.

5. Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si dan Dr. Ria Renita Abbas, M.Si selaku penguji skripsi yang telah memberikan pandangan dan saran dalam penyempurnaan skripsi kami.
6. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang senantiasa diajarkan kepada penulis selama masa-masa perkuliahan serta memberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penting bagi pengembangan diri penulis.
7. Pak Asmudir, Pak Hidayat, dan Ibu Ros yang senantiasa membantu dan memudahkan penulis dalam hal administrasi hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Informan Penulis dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi serta administrasi terkait penyusunan skripsi ini.
9. Orang Tua penulis, beserta keluarga besar tercinta atas doa kelancaran dan kesuksesan yang selalu terpanjatkan disetiap waktunya. Karena doa-doa dan restunya lah dapat menurunkan Rahmat dan keberkahan disetiap usaha yang kami lakukan.
10. Teman-teman Sosiologi 2019 yang telah memberikan warna tersendiri baik suka maupun duka selama masa perkuliahan penulis. Terkhusus sohib-sohib aliansi hoax yang selalu rekeh, kocak, dan setia menghibur serta membantu penulis ketika dalam keadaan sulit.
11. Teman-teman 'aliansi hoax' yang telah kebersamai penulis dalam hal dukungan moral, pikiran dan tenaga. Sehingga memudahkan penulis menyelesaikan penelitian ini.

12. Teman-teman Posko 9 KKNT Unhas 108 Pangkep yang telah kebersamai penulis dalam berbagai Program KKN saat itu.
13. Semua pihak yang sudah berpartisipasi dan tidak sempat penulis sebutkan satu-satu baik materi ataupun non materi.

Penulis menyadari, karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, peneliti yakin masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian ini, Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 08 September 2023

Reonaldi Hairuddin
NIM E031191028

ABSTRAK

Reonaldi Hairuddin (E031191028). Struktur Agensi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lorong Wisata (Kasus Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar). Dibimbing oleh Dr. Rahmat Muhammad, M.Si dan Hariashari Rahim, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya agen pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan faktor yang mempengaruhi tindakan dari agen tersebut dalam program lorong wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan dalam bentuk studi kasus.

Penelitian ini memperoleh data dari tiga belas informan yang pernah terlibat dan/ atau mengetahui implementasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada lima upaya yang dilakukan oleh agen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, yaitu; membentuk kelompok produktif dalam Lorong Wisata; menciptakan daya tarik wisata; mengekspos Lorong Wisata; Meningkatkan Kapasitas Pengetahuan Agen Pemerintah; dan Memperkuat Koordinasi antar Agen Pemerintah. Berbagai upaya dari agen pemerintah tersebut didorong atas Peraturan walikota yang ada dan adanya bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukannya. Keterbatasan Anggaran dana, Adanya Penolakan Masyarakat, dan Data yang tersedia masih belum sesuai menjadi penghambat agen dalam upaya pemberdayaan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Lorong Wisata, Struktur, Agensi, Pemberdayaan, Masyarakat

ABSTRACT

Reonaldi Hairuddin (E031191028). STRUCTURE OF GOVERNMENT AGENCY IN COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE TOURIST LORONG PROGRAM (Case Of The Sambung Jawa Village, Mamajang District, Makassar City). Supervised by Dr.Rahmat Muhammad, M.Si and Hariashari Rahim, S.Sos., M. Si.

This study aims to determine the efforts of government agents in empowering the community and the factors that influence the actions of these agents in the tourist alley program. This study used a qualitative research method with a descriptive research type, and in the form of a case study. This study obtained data from thirteen informants who had been involved in and/or knew about the implementation of the Lorong Wisata Program in Makassar City. Determination of informants using purposive sampling technique that meets the criteria mentioned above.

The results of this study found that there were five efforts made by government agencies in empowering the community, namely; form a productive group in Lorong Wisata; create tourist attraction; exposing Lorong Wisata; Increase Knowledge Capacity of Government Agencies; and Strengthening Coordination among Government Agencies. The various efforts of these government agencies were encouraged by the existing mayoral regulations and the existence of a form of appreciation for their performance. Limited budgetary funds, Community Rejection, and available data are still not suitable to be an obstacle for agents in efforts to empower the community.

Keywords: *Tourist Lorong, Structure, Agency, Empowement, Community*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI	12
2.1 Pemberdayaan	12
2.2 Partisipasi Masyarakat	18
2.3 Sikap Sosial.....	20
2.4 Teori Strukturasi	22
2.5 Program Lorong Wisata	25
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Kerangka Pikir	34
2.8 Definisi Operasional	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan, Tipe, dan Strategi Penelitian	38
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	39
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41

3.5 Teknik Analisis Data	44
3.6 Pengujian Keabsahan Data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
4.1 Kondisi Geografi dan Demografi	48
4.2 Kondisi Pemerintahan	51
4.3 Keadaan Ekonomi	53
4.4 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	56
4.5 Keadaan Penduduk Menurut Agama	58
4.6 Sarana Kesehatan	59
BAB V HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	61
5.1 Karakteristik Informan	61
5.2 Upaya pemberdayaan terhadap Masyarakat oleh Agen Pemerintah melalui struktur implementasi Program Lorong Wisata di kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.....	68
5.1.2 Pembentukan Kelompok Produktif dalam Lorong Wisata.....	70
5.2.2 Menciptakan Daya Tarik Wisata.....	77
5.3.2 Mengekspos Lorong Wisata	86
5.4.2 Meningkatkan Kapasitas Pengetahuan Agen Pemerintah.....	92
5.5.2 Memperkuat Koordinasi Antar Agen Pemerintah	98
5.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Agen Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan terhadap Masyarakat melalui struktur implementasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	106
5.1.3 Faktor Pendorong	107
5.2.3 Faktor Penghambat.....	112
5.4 Pembahasan Penelitian.....	117
BAB VI KESIMPULAN dan SARAN	123
6.1 Kesimpulan	123
6.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
L A M P I R A N	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	36
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kelurahan Sambung Jawa	48
Gambar 5.1 Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Ke Lorong Wisata	86
Gambar 5.2 Pemaparan Program Walikota Makassar	89
Gambar 5.3 Video Promosi Lorong Wisata Houston	90
Gambar 5. 4 <i>Pamflet</i> Diskusi Program Walikota Makassar	93
Gambar 5.5 Pertemuan Agen Pemerintah Bersama Ilmuwan ITB	94
Gambar 5.6 Kunjungan Agen Pemerintah	95
Gambar 5.7 Rapat Antar Agen Pemerintah	99
Gambar 5.8 Rapat Internal DKP Kota Makassar	100
Gambar 5.9 Halaman Utama <i>Website</i> Lorong Wisata Kota Makassar	104
Gambar 5.10 Penyerahan Penghargaan Walikota Makassar	109
Gambar 5. 11 Penghargaan SKPD terbaik Kota Makassar	110
Gambar 7.1 Wawancara Bersama Informan SM	135
Gambar 7.2 Wawancara Bersama Informan ID	135
Gambar 7.3 Wawancara Bersama Informan AR	136
Gambar 7.4 Wawancara Bersama Informan NS	136
Gambar 7.5 Wawancara Bersama Informan MYN	136
Gambar 7.6 Wawancara Bersama Informan FA	137
Gambar 7. 7 Wawancara Bersama Informan SA	137
Gambar 7. 8 Wawancara Bersama Informan SA	138
Gambar 7.9 Beberapa Lokasi Lokasi Lorong Wisata	150

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	30
Tabel 3.1 Rentang Waktu Penelitian	39
Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk di Kecamatan Mamajang Tahun 2020	50
Tabel 4.2 Distribusi RT/RW Kelurahan Sambung Jawa	52
Tabel 4.3 Jenis dan Banyaknya Tempat Pemasaran	53
Tabel 4.4 Akomodasi Penginapan	54
Tabel 4.5 Lembaga Keuangan	54
Tabel 4.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	55
Tabel 4.7 Sekolah, kelas, murid dan guru di kelurahan Sambung Jawa.....	56
Tabel 4.8 Bangunan Keagamaan	58
Tabel 4.9 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya	59
Tabel 5.1 Karakteristik Informan.....	67
Tabel 5.2 Rangkuman Pembentukan Kelompok Produktif.....	76
Tabel 5.3 Rangkuman Penciptaan Daya Tarik Wisata	84
Tabel 5. 4 Rangkuman Kegiatan Ekspos Lorong Wisata	91
Tabel 5.5 Rangkuman Peningkatan Pengetahuan Agen Pemerintah	97
Tabel 5.6 Rangkuman Penguatan Koordinasi Antar Agen Pemerintah.....	105
Tabel 5.7 Rangkuman Faktor Pendorong	111
Tabel 5.8 Rangkuman Faktor Penghambat	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Hadiyono (2020), Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang juga mengadopsi konsep-konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dan secara jelas dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang Undang Dasar 1945 (UUD'45), serta penjelasan lebih lanjut dari undang-undang tersebut yang isinya mengemukakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material dan mengadopsi konsep negara kesejahteraan dengan memposisikan negara sebagai pihak penanggungjawab dalam memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.

Perkembangan historis dari sesuatu yang kadang-kadang disebut sebagai negara kesejahteraan Keynesian menjadi dasar dari arti istilah negara kesejahteraan (Roza & Parlindungan S, 2019). Model Negara Kesejahteraan menekankan pentingnya serikat pekerja, peran berbagai organisasi dan profesi dalam kerangka masyarakat sipil (*civil society*) yang mencerminkan peningkatan peran dari masyarakat terhadap pembangunan (Mudiarta, 2016).

Lebih lanjut lagi, Model Negara Kesejahteraan ini berjalan beriringan dengan asas demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak lama. Untuk memajukan kesejahteraan, kekuasaan pemerintahan harus didistribusikan agar efektif dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat atau disebut juga

facilitating effect (Sukowati, 2010). Namun, bukan tanpa halangan Indonesia menerapkan konsep pembangunan dengan Model Negara Kesejahteraan, tentu dengan adanya Demokrasi, dinamika politik menjadi unsur yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan, seperti pergantian masa orde lama menuju masa orde baru, lalu Masuk ke masa reformasi. Akan tetapi, dalam perjalanannya, pemerintah kemudian “menelan” masyarakat yang membentuknya. Masyarakat hanya menjadi objek kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah.

Pembangunan era kemerdekaan, tepatnya tahun 1960-an, Soekarno sebagai seorang presiden Indonesia pada saat itu percaya bahwa Indonesia harus berperan penting di dunia dengan menjadikan Jakarta fokus dalam melakukan pembangunan. Soekarno melihat pembangunan Kota Jakarta sebagai bagian dari proyek besar Nasionalisme. Namun ternyata, Soekarno membangun Kota tersebut tidak hanya untuk orang-orang di Jakarta, melainkan orientasinya juga mementingkan tamu asing yang datang. Jakarta seperti pameran bagi orang asing. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan pada era tersebut masih sangat kental dengan otoritas kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara. Jika kita melihat lebih dekat, kita bisa menemukan ketidaksetaraan yang tersembunyi, seperti orang kecil yang hidup dalam bayang-bayang gedung yang menjulang tinggi (Fisu, 2019).

Pergantian kepemimpinan dari masa orde lama ke masa orde baru, menandakan adanya perbedaan pola pembangunan dari setiap kepala negara dengan melekatnya kepemimpinan yang tentunya sedikit-banyak mempengaruhi keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Meskipun Pembangunan yang dilaksanakan itu tidak

lagi berpusat ke daerah Jakarta untuk menjadi citra Indonesia di masa itu, tetapi Pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi masa selanjutnya masih berpusat di Pulau Jawa (Iqbal *et al.*, 2018). Tentunya pembangunan ini menyebabkan kesenjangan terhadap akses kesejahteraan masyarakat yang berada di luar pulau jawa.

Pembangunan yang terjadi di masa lalu menjadi perhatian Rustiadi (2003), mereka mengungkapkan Sistem pemerintahan terpusat di masa tersebut telah melemahkan aspirasi dan kreativitas masyarakat lokal dan daerah, sebab terbatasnya kapasitas atau pemberdayaan masyarakat lokal. Pengetatan ini dilakukan secara sistematis oleh pemerintah pusat dan menimbulkan efek pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut. Potensi masyarakat untuk berdaya dengan swasembada telah dirusak secara berlebihan oleh pemerintah melalui rekayasa politik dan hukum yang tidak adil, mengabaikan kehidupan masyarakat lokal yang berujung pada kemiskinan masyarakat lokal.

Memasuki era reformasi di Indonesia, proses perubahan yang dipelopori oleh semangat reformasi membuat terjadinya perubahan besar dalam kehidupan bernegara dengan dibuatnya sejumlah amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945. Hal ini membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap terjadinya perubahan dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, perubahan sudah mulai terlihat di akhir tahun 1990-an, Indonesia mulai mengalami desentralisasi pembangunan yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Setiawan & Hakim, 2008).

Pada dasarnya tujuan penerapan sistem desentralisasi adalah meningkatkan partisipasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program pembangunan yang dilaksanakan. Di antara perubahan yang terjadi adalah perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ke arah yang lebih demokratis agar membuka lebih banyak peluang bagi proses desentralisasi. Sistem pemerintahan yang sebelumnya *sentralistik* perlahan mengalami perubahan dan penyesuaian dalam proses pembangunan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada pemerintah daerah mengelola pemerintahannya sendiri sebagai perwujudan dari sistem desentralisasi (Primanto, 2020).

Sistem desentralisasi yang masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini, menjadi momentum baik bagi setiap kepala daerah wewujudkan kesejahteraan masyarakatnya secara utuh. Tentunya, setiap kepala daerah dituntut untuk menerapkan formula yang merujuk pada paradigma pembangunan yang tepat bagi daerahnya. Menurut (Prasojo & Fauziah, 2015), pergeseran paradigma *production centered development* tidak mempertimbangkan pencapaian tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak, menuju paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat (*people oriented development*) dengan menekankan pentingnya kerjasama dan keseimbangan peran berbagai sektor, baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta intinya pada keseimbangan peran dan posisi untuk menentukan ketercapaian kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Pembangunan yang berbasis masyarakat tentunya menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan tidak hanya menguntungkan pihak swasta

saja, tapi dapat menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan tanpa meminggirkan masyarakat miskin, meningkatkan inklusi sosial melalui kebijakan yang berbasis hak asasi manusia, *non*-diskriminasi, dan perlindungan bagi mereka yang kurang mampu sebagai inti dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Sehingga, kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi dan keinginan individu maupun kolektif dapat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya (Hasan, 2015).

Selain itu, menurut Maspaitella & Rahakbauwi (2014), untuk memastikan partisipasi sosial perlu melibatkan pelaku pemberdaya sebagai perantara dengan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan di setiap daerah, maka aktor yang terlibat dalam proses pembangunan, seperti pemberdaya yang langsung berinteraksi dengan masyarakat perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan secara baik, misalnya melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Memberdayakan masyarakat berarti berinvestasi terutama pada masyarakat miskin untuk meningkatkan sumber daya dan kemampuan mereka, serta kapasitas individu dan kelompok. Pemberdayaan masyarakat harus efektif, maka harus dilaksanakan mulai dari tingkat nasional hingga berjenjang ke setiap daerah. Aturan, regulasi, mekanisme kelembagaan, nilai dan sikap harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi maupun budaya setempat agar masyarakat miskin dapat berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi atau model untuk menggali potensi dan kemampuan masyarakat dalam memperluas

pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhannya baik secara ekonomi maupun sosial.

Beberapa daerah di Indonesia yang telah melakukan upaya pemberdayaan terhadap Masyarakatnya dalam proses pembangunan adalah kabupaten Blitar, Jawa Timur; kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan tidak hanya membahas masalah dan mencari solusi, tetapi juga mencari tahu reaksi masyarakat terhadap manfaat yang didapat dari adanya program pembangunan.

Pertama, Kampung Wisata Ekologi (KWE) Puspa Jagad yang terletak di kabupaten Blitar, Jawa Timur. Manfaat yang dirasakan antara lain adanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, seperti akomodasi wisata dikelola masyarakat (*homestay* atau *indekos*), sekitar 15 *homestay* semua dikelola masyarakat, masyarakat juga menyediakan berbagai macam pelatihan pembuatan gula. Pemilik industri gula jawa sekaligus pengelola KWE Puspa Jagad hanya sebagai pendamping peningkatan produktivitas mereka (Ridlwan *et al.*, 2017).

Kedua, Pemberdayaan masyarakat di kabupaten bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa Wisata Kreet, program pemberdayaan dilakukan dengan cara menyeluruh dan berkesinambungan melalui Kelompok Sadar Wisata. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mencanangkan program pemberdayaan masyarakat komunitas kreet melalui sosialisasi, diskusi, lomba, demonstrasi dengan berbagai pelatihan dan rintisan pertunjukan seni dan budaya tradisional. Tujuan akhir bentuk pemberdayaan ini

diwujudkan dan dilaksanakan untuk mendukung dan mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semula tidak berdaya menjadi berdaya dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Desiati, 2013).

Ketiga, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Inovasi pembangunan desa yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir karena melihat potensi lokal yang dimiliki Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat Desa Burai merupakan unit atau aktor yang dominan dalam pengembangan program pemberdayaan, dan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir hanya bertindak sebagai pemrakarsa dan pihak yang mengendalikan program pemberdayaan tersebut (Malinda, 2019).

Selain itu, perlu juga diketahui sesuatu yang dapat menjadi faktor kegagalan dalam membentuk kemandirian dari masyarakat yang sering berasal dari kinerja fasilitator (dalam penelitian ini disebut sebagai agen) tidak profesional dan kurang tanggap dalam melakukan kegiatan pemberdayaan (Muslim, 2017). Membangun kemandirian masyarakat merupakan proses yang membutuhkan tenaga, pemikiran, dan waktu yang cukup panjang. Maka, kegiatan ini membutuhkan tenaga fasilitator yang memahami kondisi dan tanggap atas situasi di lapangan, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan kemandirian masyarakat tercipta sesuai dengan yang direncanakan. Fasilitator profesional dan handal yang dimaksud adalah fasilitator yang mempunyai kualifikasi kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mendampingi masyarakat.

Data dan informasi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan karena mereka akan merasakan langsung dampak dari pembangunan yang terjadi. Selain itu, penting pula diperhatikan peran agen dalam proses pembangunan. Adanya hak mengatur daerahnya sendiri yang diberikan kepada kepala daerah juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Walikota Makassar, Bapak Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto yang senantiasa membuat inovasi agar lorong-lorong Kota dulunya ada dalam kondisi kumuh, gelap, gersang dan sering menjadi sumber penyakit sosial masyarakat menjadi lorong yang bersih, asri, segar dan sejuk, aman, nyaman, serta indah dipandang mata. Beberapa program pembangunan Walikota Makassar dalam menasar lorong sebagai fokus dalam pembangunan di masa kepemimpinannya, misalnya lorong garden dengan memanfaatkan sisi lorong untuk ditanami beberapa komoditi penting yang bernilai ekonomis, pembangunan ini mulai dirintis pada tahun 2018; kemudian, ada pula program “*Singara’na Lorongta*” dengan memasang lampu *LED* di beberapa titik lorong-lorong Kota Makassar yang masih dalam kondisi gelap; lalu ada juga program Lorong Wisata sebagai pengembangan dari program lorong garden yang menambahkan unsur destinasi wisata lorong dengan karya mural dan warna-warni menghiasi tembok-tembok (Pemerintah Kota Makassar, 2023).

Program Lorong Wisata merupakan pembangunan yang meningkatkan kebermanfaatan ruang sebagai tempat destinasi baru (dengan dipenuhi karya mural dan warna-warni tembok yang meningkatkan keindahan) dan di setiap sisinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat menanam beberapa jenis komoditi yang bernilai

ekonomis. Kota Makassar merupakan daerah yang menerapkan Program Lorong Wisata, program ini menjadi salah satu fokus dalam pembangunan ruang di Lorong-lorong perkotaan untuk menciptakan inklusi sosial bagi masyarakat luas dan program ini diinisiasi oleh Walikota Makassar, bapak Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto, di antara 7.250 lorong yang ada di Kota Makassar ditargetkan sebanyak 5.000 lorong menjadi sasaran program Lorong Wisata. Per April 2023 lorong wisata yang ada di Kota Makassar sudah mencapai angka 1.700 lorong dan akan bertambah setiap tahunnya (Diskominfo Kota Makassar, 2021).

Penelitian ini akan mengarah kepada Lorong Wisata yang ada di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Lokasi tersebut dipilih atas 2 (dua) pertimbangan Peneliti. Pertama, kebaruan lokasi penelitian. Kedua, peneliti melihat pola permukiman penduduk yang begitu padat, tidak jarang kita akan menemukan 2 (dua) rumah yang saling berdempetan dan sarat akan konflik sosial. Ketiga, adanya Lorong wisata yang tampak sangat berbeda dibandingkan dengan Lorong wisata lainnya, perbedaan tersebut tampak pada jalanan masuk Lorong, tanaman yang berada di pekarangan rumah-rumah warga, dan hanya beberapa Lorong yang terdapat beberapa kelompok masyarakat produktif. Berdasarkan temuan ini, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Struktur Agensi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lorong Wisata di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Peneliti akan menggunakan teori “Strukturasi” Anthony Giddens untuk menganalisis bagaimana dualitas dari agen

pemerintah melalui struktur implementasi program Lorong Wisata yang ada di kelurahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan terhadap Masyarakat oleh Agen Pemerintah melalui struktur implementasi Program Lorong Wisata di kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar?
2. Apa yang menjadi Faktor Pendorong dan Penghambat Agen Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan terhadap Masyarakat melalui struktur implementasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui upaya pemberdayaan terhadap Masyarakat oleh Agen Pemerintah melalui struktur implementasi Program Lorong Wisata di kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
2. Memahami dan mempelajari Faktor Pendorong dan Penghambat Agen Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan terhadap Masyarakat melalui struktur implementasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi kajian sosiologi khususnya tentang pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Strukturasi Anthony Giddens.
2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam membuat kebijakan pembangunan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat. Dari temuan peneliti, pemerintah dapat memperkuat sesuatu hal yang menjadi pendorong terjadinya pemberdayaan, dan menghindari atau mengurangi sesuatu hal yang menjadi penghambat terjadinya pemberdayaan yang menciptakan masyarakat mandiri dalam pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI

2.1 Pemberdayaan

Terminologi dari Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Empowerment*, kata “*Power*” berarti memberikan “daya” atau kemampuan agar mereka berdaya (Nurfahmiati, 2019). Sederhananya, Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan diartikan sebagai kemampuan individu atau Kelompok yang berinteraksi dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan dan menjadi alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat dengan membutuhkan suatu kelembagaan karena proses pemberdayaan merupakan pengembangan kapasitas terhadap manusia (Mardikanto, 2014).

Pemberdayaan dalam konteks implementasi selalu dipersamakan artinya dengan pengembangan Komunitas/ Masyarakat (*community development*) atau di kalangan organisasi masyarakat sipil sering menggunakan terminologi tersebut dalam memberikan pendampingan atau penguatan masyarakat di berbagai kegiatan, baik yang berhubungan dengan proses pengembangan masyarakat agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maupun memutuskan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek dalam pembangunan tetapi harus menjadi subjek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang sementara dalam proses perencanaan, impementasi, dan/atau memasuki tahap evaluasi dengan cara diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan

menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses yang sementara berlangsung dari ketiga tahap pembangunan tersebut (Afriansyah *et al.*, 2023).

Filosofi pemberdayaan didasarkan atas premis masyarakat memiliki kapasitas untuk memilih pilihan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan mereka (Feste & Anderson, 1995). Artinya, membantu Masyarakat secara efektif mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat kesadaran diri yang diperlukan dalam memikul tanggung jawab atas keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dari mereka.

Prinsip pemberdayaan masyarakat penting menjadi salah satu perhatian karena terkait langsung dengan persoalan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan secara utuh, komprehensif dan menyeluruh agar sasaran yang ingin dicapai terutama dalam memberdayakan kelompok yang dinilai sangat rentan terhadap masalah kemiskinan dapat direalisasikan (Haris, 2014). Maryani & Nainggolan (2019) dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat” menyebutkan ada 4 prinsip digunakan untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan; pertama, prinsip kesetaraan ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan; kedua, prinsip partisipasi ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. ketiga, prinsip Keswadayaan atau kemandirian ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat

daripada bantuan pihak lain; dan terakhir, ialah prinsip berkelanjutan yang memandang perlunya proses pemberdayaan dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah penekanan pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan; pertama, pendekatan *mikro* dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*; kedua, Pendekatan *mezzo* dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat) melalui kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok; Terakhir, ialah Pendekatan *Makro* sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*) karena penerima manfaat perubahan diserahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas (Khoiriyah, 2019).

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ekspansi *asset* dan kapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin). Kapabilitas tersebut bisa melekat pada diri individu, kelompok atau organisasi, komunitas dan masyarakat luas (*society*). Kapasitas tersebut ialah kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Hamid, 2018). Tentunya, proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek dalam proses pembangunan. Kapasitas adalah energi yang digunakan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan

asset tersebut. Kapasitas dapat dipisahkan kedalam beberapa kategori, yaitu kemampuan manusia (*human capability*), kemampuan sosial (*social capability*), dan kemampuan politik (*political capability*).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menciptakan “Kemandirian” dalam kapasitas diri masyarakat setelah dengan adanya daya (kemampuan masyarakat). Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material (Miradj & Shofwan, 2021). Kemampuan kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Afektif merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu dengan harapan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Psikomotorik merupakan kecakapan terhadap keterampilan yang dimiliki masyarakat agar bisa bersaing dengan masyarakat yang lain agar mereka dapat keluar dari masalah kemiskinan yang selama ini membelenggu dalam kehidupan masyarakat miskin.

Menurut Hikam (dalam Handono., Hidayat., dan Purnomo, 2020) tahapan pemberdayaan berbasis *civil society* (masyarakat sipil) terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan; pertama adalah *mapping*, identifikasi *need assessment*, *problem basic* yang menyangkut masyarakat; kedua adalah klasifikasi dan gerakan berbagai potensi sesuai

dengan karakteristik masing-masing dengan proses gerakan dari kalangan *grass root* atau kalangan bawah bukan lagi *top down* karena berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh pihak yang diberdayakan; Ketiga adalah gerakan sistematis, artinya semua komponen dalam masyarakat bergerak dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas wirausaha, kemandirian, serta mempertahankan ciri khas masyarakat tersebut.

Tugas Pemberdaya atau pemerintah adalah sebagai fasilitator, pemerintah dan pihak pemberdaya lainnya harus memampukan mereka agar mengenali akar permasalahan yang dihadapi dan memahami cara efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut (Maryam, 2016). Fasilitator dituntut untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kultur dan pola hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan jika fasilitator berasal dari warga setempat (Damanik *et al.*, 2018).

Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak pada kemandirian masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin (Hadiyanti, 2008). Proses pemberdayaan masyarakat didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Peran tim pemberdayaan masyarakat pada awal proses sangat aktif dan terus berkurang hingga masyarakat sudah mampu melakukan kegiatannya secara mandiri.

Oleh karena itu, fasilitator diharapkan keberadaannya dalam mendukung tercapainya pemberdayaan masyarakat melalui program penyuluhan dan pemberian berbagai sarana-prasarana pendukung, dilakukan dengan cara bekerja sama dengan instansi terkait, seperti lembaga keagamaan, lembaga keuangan (perbankan), lembaga sosial, dinas perindustrian, dan perdagangan. Salah satu tujuan pemberdayaan ialah menghasilkan masyarakat yang peduli sekaligus turut serta secara aktif dan kreatif untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pelestarian objek wisata (Lahamit, 2021).

Lebih lanjut lagi, Sosialisasi yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemberdayaan diartikan sebagai proses Pendidikan masyarakat untuk mengenal, memahami, mentaati, menghargai, serta menghayati norma-norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Secara khusus sosialisasi mencakup suatu proses masyarakat mempelajari kebudayaannya, belajar mengendalikan pergaulan dengan anggota kelompok masyarakat, serta mempelajari peranan individu dalam masyarakat. Kegiatan Sosialisasi bisa dilakukan melalui pertemuan langsung satu dengan yang lainnya, tapi dapat juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media atau surat, bisa berlangsung secara formal atau informal, baik sengaja maupun tidak sengaja (Soekanto dalam Nurdianti, 2014).

Pemberdayaan sebagai proses yang melintasi ruang dan waktu, tentunya sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun pemanfaatan dari hasil proses pembangunan karena tujuan dari pemberdayaan ialah

membuat masyarakat menjadi punya kekuatan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, bagian selanjutnya akan menjelaskan lebih rinci terkait bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam proses pembangunan berbasis pemberdayaan dengan keterlibatan masyarakat.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka melalui proses penyusunan rencana pembangunan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 2004). Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil masyarakat untuk ikut terlibat dalam membuat keputusan mulai dari perencanaan hingga pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang segera dilaksanakan, manfaat yang diperoleh, serta tahapan pelaksanaan dan evaluasi hasilnya (Uceng *et al.*, 2019).

Beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan dijabarkan menjadi beberapa bagian oleh Conyers (dalam Fadil, 2013), yaitu, pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan akan mengalami kegagalan; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai terhadap pembangunan yang sedang terjadi jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan; dan ketiga terbentuk suatu

anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat terlibat dalam pembangunan di wilayahnya sendiri. Sehingga, mereka pun mempunyai hak turut serta dalam “rembuk” (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Beberapa Tahapan dalam pembangunan yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian, pertama disebut tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dapat meresap partisipasi masyarakat dalam bentuk ide pembangunan; kedua masuk dalam tahap pelaksanaan sebagai bagian terpenting dalam program pembangunan, bisa dalam bentuk ide, materi, dan sebagai anggota dalam proses pembangunan; Ketiga ialah tahap masyarakat berpartisipasi dalam menikmati hasil dari pembangunan; Terakhir, tahap evaluasi yang juga dianggap penting karena dapat menjadi informasi umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program. (Sulistiyorini *et al.*, 2015)

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dijabarkan menjadi 2 (dua) macam bentuk oleh, yaitu pertama, bentuk nyata (memiliki wujud) baik uang, harta benda, tenaga dan keterampilan; kedua, bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi masyarakat melalui buah pikiran (ide), partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif (Bao *et al.*, 2015).

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat tersebut tidak terlepas dari sikap sosial yang dimiliki setiap individu dan tergabung dalam suatu kelompok masyarakat tertentu dengan berbagai macam hal pengaruh terhadap dirinya hingga membuatnya

berpartisipasi dalam suatu proses pembangunan yang bersifat pemberdayaan. Bagian selanjutnya dari tinjauan pustaka ini akan menjelaskan lebih rinci terkait hal-hal yang menjadi pengaruh sikap sosial masyarakat memilih untuk berpartisipasi ataupun tidak ikut berpartisipasi.

2.3 Sikap Sosial

Secara terminologi, Sikap berasal dari bahasa Latin yaitu “*aptus*” menggambarkan keadaan siap secara mental dengan melakukan kegiatan. Sedangkan, sikap dalam bahasa Inggris disebut “*attitude*” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia merupakan suatu keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman, serta memberikan pengaruh dinamika atau arah respon individu pada seluruh objek dan situasi yang berkaitan dengannya (Rahmawati, 2022). Sebab, sikap sebagai suatu kecenderungan untuk memberi respon, baik positif maupun negatif terhadap orang, benda atau situasi tertentu. *Attitude* (sikap) merupakan satu predisposisi atau kecenderungan yang relatif dalam kondisi stabil dan berlangsung secara terus-menerus untuk bertindak laku atau untuk memberikan reaksi dengan satu kegiatan tertentu.

Selain itu, Sikap dapat pula didefinisikan sebagai seperangkat emosi, keyakinan, dan perilaku terhadap objek, orang, benda, atau peristiwa yang seringkali merupakan hasil dari pengalaman atau pendidikan, dan mereka dapat memiliki pengaruh kuat atas perilaku individu tersebut. Sikap juga dapat diartikan sebagai keadaan pikiran, seperangkat pandangan atau pemikiran, mengenai beberapa topik

(disebut objek sikap) yang memiliki fitur kualitas positif, negatif, dan netral (Gerungan, 1991). Jika merujuk kepada sikap sosial, maka sikap itu memiliki kecenderungan seseorang untuk bertindak atau bereaksi atas kondisi, lingkungan, objek, ataupun orang lain baik itu menyenangkan ataupun tidak, positif maupun negatif dan berhubungan dengan mental serta emosional seseorang (Sarnoto & Andini, 2017).

Sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang seperti sebelumnya dan dapat dilakukan secara berulang-ulang terhadap obyek sosial, dan biasanya dinyatakan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Sedangkan, sikap individu ialah sikap yang dimiliki dan dinyatakan oleh seseorang individu saja. Azwar (dalam Simbolin, 2015) menyatakan bahwa sikap memiliki struktur yang terdiri atas 3 (tiga) komponen, pertama ialah Kognitif yang berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip; kedua ialah afektif yang melibatkan perasaan atau emosi; ketiga ialah konatif atau kecenderungan bertindak (berperilaku) dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Ketiga komponen dalam struktur sikap sosial tersebut dipengaruhi oleh kepuasan kebutuhan fisiologis (tempat tinggal, makanan, pakaian), biasanya berhubungan dengan uang; kebutuhan keamanan yang mengharapkan terhindar dari segala ancaman terhadap dirinya dan orang terdekatnya; kebutuhan sosial dengan merasa menjadi bagian dari anggota suatu kelompok; selain itu, juga dipengaruhi pula oleh kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri, hingga pengaruh kebudayaan.

Menurut Tatik (dalam Sarnoto & Andini, 2017), Faktor-faktor yang menjadi pembentuk sikap sosial dapat pula dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pertama,

faktor internal atau faktor dari dalam dirinya yaitu cara individu menangani dunia luarnya dengan menyeleksi dan menentukan hal-hal yang diterima dan ditolaknya dalam pengalaman-pengalaman emosional dan faktor eksternal atau faktor dari luar diri yaitu hal-hal dan keadaan yang berada di luar diri sebagai suatu rangsangan untuk membentuk ataupun merubah sikapnya, seperti pengamatan terhadap orang lain, adanya penghargaan dan hukuman, meniru, penerimaan dan penolakan dari luar diri yang berasal dari keluarga, lingkungan dan teman sebaya dengan sugesti dari luar diri.

Sebagai ciri, sikap itu dipelajari dengan motif-motif psikologis lainnya; sikap pula memiliki kestabilan yang bermula dari dipelajari, kemudian lebih kuat, tetap, dan stabil melalui pengalaman; sikap juga sebagai kepentingan pribadi dalam konteks masyarakat yang melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain juga antara barang atau situasi; serta sikap pula berisi kognisi dan afeksi yang berisi informasi faktual; selain itu pula, sikap itu memiliki arah pendekatan-penghindaran terhadap suatu objek yang cenderung didekati apabila dianggap baik oleh subjek (Sari, 2020).

2.4 Teori Strukturasi

Teori strukturasi merupakan teori yang mencoba menemukan *likage* atau pertautan antara struktur fungsional dan konstruksionisme-fenomenologis. Giddens tidak puas dengan teori struktural-fungsional yang menurutnya terjebak dalam pandangan *naturalistik*. Pandangan ini me-reduksi aktor dalam stuktur (tindakan manusia disebabkan karena adanya dorongan dari luar), kemudian sejarah dipandang secara mekanis, dan bukan suatu produk kontingensi dari aktivitas agen. Tetapi,

Giddens juga tidak sepaham dengan konstruksionisme-fenomenologis yang baginya disebut sebagai akhir dari imperialisme subjek (tujuan dari tindakan manusia) tanpa adanya struktur. Giddens memandang bahwa struktur bukan bersifat *eksternal* dan subjek dalam struktur juga memiliki sifat yang otonom karena memiliki andil dalam mengontrol struktur itu (Demartoto, 2013).

Konsep strukturasi Anthony Giddens melihat relasi antara agen dan struktur yang perwujudannya berupa praktik sosial (*social practices*) dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Giddens, 2010). Konsep praktik sosial Giddens sebagai esensi dari perwujudan strukturasi hampir mirip dengan konsep tindakan sosial (*social action*) Max Weber, perbedaannya Giddens lebih melihat tindakan sosial sebagai relasi dualitas sedangkan Weber lebih menekankan pada perilaku aktor yang lebih menunjukkan dualisme dengan tekanan terletak pada pengaruh subjek (pelaku, subjek, agen) yang bertindak penuh dengan makna. Kaitan antara pelaku dan struktur bersifat fungsional. Kaitan itu timbul karena proses strukturasi dalam bentuk reproduksi praktik sosial dan struktur yang terjadi dari perulangan interaksi antara para pelaku konkret dalam ruang dan waktu (Giddens, 2000).

Tipe kesadaran yang menjadi bagian dari manusia menurut Giddens (dalam Demartoto, 2013) terbagi menjadi tiga tipe kesadaran. Pertama, agen dalam melakukan praktik sosial terkadang tidak mengetahui secara jelas tujuan dari tindakannya tersebut, maka agen berada dalam ranah motivasi tidak sadar (*unconscious motive*). Kedua, ketika agen melakukan suatu praktik sosial dikarenakan praktik tersebut terus berulang

dalam ruang dan waktu, maka agen berada di tipe kesadaran praktis (*practical consciousness*). Ketiga, agen mampu menjelaskan secara rasional alasan dari melakukan suatu praktik sosial, maka agen tipe kesadarannya ialah kesadaran diskursif (*discursive consciousness*).

Prinsip dalam struktur menurut Priyono (2003) terdiri atas tiga struktur. Pertama, struktur signifikasi (*signification*), yaitu struktur yang berhubungan dengan pengelompokan dalam simbol, pemaknaan dan wacana, agen memiliki kekuasaan untuk menafsirkan dan memanipulasi struktur kebahasaan dengan interpretasi berbagai makna. Kedua, struktur penguasaan (*domination*), yaitu struktur mencakup penguasaan orang dalam pengertian penguasaan politik dan ekonomi melalui pengendalian agen terhadap berbagai sumber daya. Ketiga, struktur legitimasi (*legitimation*), yaitu struktur yang berkaitan dengan peraturan normatif, suatu tindakan agen dianggap sah atau tidak dalam tatanan sosial, ditentukan oleh struktur legitimasi ini. Ketiga gugus struktur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya (Nashir, 2010).

Lebih lanjut lagi Giddens (dalam Achmad, 2020) mengidentifikasi bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan sejalan dengan Marx, Giddens juga percaya sumberdaya merupakan kendaraan kekuasaan. Marx lebih tertarik pada hubungan antara 'alat produksi' dalam masyarakat kapitalis. Sedangkan, Giddens lebih memahami tentang hubungan kekuasaan sebagai bentuk interaksi antara aktor dan struktur. Dalam interaksi ini, sumberdaya digunakan sebagai bentuk otoritas

yang diilustrasikan sebagai hubungan bos dan karyawan. Sumber daya juga dapat digunakan dalam bentuk properti seperti alokasi kekayaan atau properti.

Giddens (dalam Wirawan, 2012) menjelaskan tentang ruang dan waktu, dalam membahas tentang waktu ia membedakannya menjadi tiga dimensi. Pertama, dari pengalaman hari demi hari (*reversible time*), hal ini berkenaan dengan keberlangsungan waktu pengalaman hari demi hari yang dapat dibalik. Kedua, jangka waktu individual (*irreversible time*), waktu kehidupan individu yang tidak dapat dibalik. Ketiga, *longue duree* lembaga-lembaga yang berkenaan dengan waktu keberlangsungan jangka panjang dan dapat dibalik dari lembaga-lembaga tersebut. Dalam memahami ruang, Giddens menawarkan konsep regionalisasi, tergolong menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan pusat atau kawasan pinggiran; kawasan depan atau kawasan belakang; dan kawasan terbuka atau kawasan tertutup bergantung pada kondisi keterbukaan/ketertutupan zona tersebut bagi “pihak luar”.

Untuk memperdalam pembahasan terkait sikap sosial, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam program Lorong Wisata, maka penulis memilih teori strukturasi sebagai landasan untuk membedah berbagai upaya dan permasalahan yang ada

2.5 Program Lorong Wisata

Program Lorong wisata merupakan salah satu Program Prioritas Walikota Makassar Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto sejak 2021 dalam rangka percepatan mewujudkan Kota Dunia yang “*Sombere* dan *Smart City*” dengan imunitas yang kuat

untuk semua, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan Program ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Lorong Garden dan pemenuhan Lima Ribu Lorong Wisata belum dapat menampung kebutuhan dan perkembangan hukum. Peraturan ini memuat definisi program Lorong wisata, Agen yang diberikan kekuasaan untuk terlibat dalam pembentukan Lorong Wisata hingga Sumber Pembiayaan Lorong Wisata ini.

Lorong Wisata dalam PERWALI Nomor 94 Tahun 2022 didefinisikan sebagai Lorong yang dapat menjadi daerah kunjungan wisata yang memiliki infrastruktur yang baik, lingkungan asri, indah, bersih, hijau, dan menarik serta terdapat perputaran ekonomi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian warga tersebut. Lorong wisata ini ditentukan oleh pihak kecamatan berdasarkan Usulan dari kelurahan melalui koordinasi bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT dan RW setempat, setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama tim ahli dari perangkat daerah setempat dan/atau tim ahli walikota makassar sebelum ditetapkan menjadi Lorong Wisata.

Pelaksanaan Program Pembentukan Lorong Wisata melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan BUMD, juga melibatkan Perguruan tinggi/Lembaga Pendidikan, Badan/Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat/ *Non-Governmental Organization*, dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan seperti TP PKK (Tim

Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional Daerah), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, Kader Posyandu, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Selain itu, adapula pembentukan Dewan Lorong untuk setiap Lorong Wisata sebagai unsur masyarakat yang berdomisili di dalam Lorong yang ditetapkan oleh Camat dengan fungsi memberdayakan Lorong di wilayahnya. Mereka ialah agen-agen pemerintah menjadi aktor dengan kekuasaan membentuk dan memberdayakan Lorong wisata sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dewan Lorong mempunyai tugas menjadi mitra dalam penyebarluasan informasi Lorong Wisata kepada masyarakat, melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan Lorong Wisata, melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan serta *stakeholder* terkait dalam pengembangan Lorong Wisata.

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan untuk BUMD berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Perguruan tinggi/ Lembaga Pendidikan memiliki tugas dan peran dalam mendorong, membimbing, dan membantu dalam pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dengan menggandeng beberapa *stakeholder* terkait, juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Analisa terkait perencanaan desain Lorong wisata berdasarkan karakteristik dan potensi Lorong di masing-masing lingkungan/ Kelurahan.

Badan/Lembaga Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan dan pendampingan untuk optimalisasi program Pembentukan Lorong Wisata sesuai mekanisme dan prosedur serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk pelaksanaan CSR agar berkontribusi kepada masyarakat, dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar menitikberatkan CSR pada lingkungan Lorong Wisata binaan. Kedua bentuk pelaksanaan tersebut di bawah koordinasi dan arahan forum CSR Daerah.

Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah terdiri dari TP PKK, LPM, Karang Taruna, Kader Posyandu, RT dan RW. Mereka bertugas sebagai pendukung pelaksanaan program Lorong Wisata bersesuaian dengan program kelembagaan masing-masing dan program yang ada di Lorong wisata. selain itu, ada juga Organisasi Kemasyarakatan sebagai pendukung pelaksanaan Program Wisata terdiri dari DEKRANASDA dan Dharma Wanita yang memiliki tugas dan peran sesuai dengan program masing masing dan berkesesuaian dengan program yang ada di Lorong Wisata.

Untuk mendukung tugas keseluruhan di atas maka terbentuk Tim Teknis Lorong Wisata yang dapat dibentuk oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tugas dan perannya masing-masing pada program Lorong Wisata. Selain itu, adapula Gugus Tugas yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Gugus Tugas dan Tim Teknis ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Gugus Tugas Lorong Wisata bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Lorong Wisata, mengumpulkan data Lorong Wisata, Menyusun prioritas program untuk kegiatan Lorong Wisata, Melakukan evaluasi, memonitor, pelaporan kebijakan pelaksanaan Lorong Wisata, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Tim Teknis Lorong Wisata Bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Lorong Wisata dibentuk Sekretariat, Sekretariat bertugas mengoordinir tiap SKPD, Kecamatan, Perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sekretariat Gugus Tugas Lorong Wisata berkedudukan di Dinas Pariwisata Kota Makassar. Setiap SKPD terlibat dalam pelaksanaan Pembentukan Lorong Wisata wajib melakukan pembinaan terhadap semua aktivitas/kegiatan terkait dengan Pembentukan Lorong Wisata.

Pembentukan Lorong Wisata ini memiliki pembiayaan yang berasal dari 3 macam sumber. Pertama, APBD yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD, CSR, dan sumber lainnya yang sah. Kedua, bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat. Ketiga, partisipasi dan swadaya masyarakat baik dari domisili Lorong yang akan dijadikan Lorong Wisata maupun masyarakat atau di luar dari domisili tersebut.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan riset-riset ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai literasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Riset terdahulu ini penting untuk melihat perubahan-perubahan upaya pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan. Tabel berikut menyajikan penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjang penelitian yang rencananya dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode & Hasil
1.	(Gea, 2022)	Keberdayaan Sosial Dalam Program KOTAKU Di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar	Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan dari sebanyak 89 sampel penelitian, keberdayaan masyarakat saat melaksanakan program KOTAKU lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum dan sesudah adanya Program KOTAKU. Selain itu, Keberdayaan Masyarakat dalam indikator kerjasama menunjukkan kerjasama yang rendah masyarakat pada saat sebelum adanya program,

			dan menjadi tinggi pada saat dan setelah dijalankannya program.
2.	(Malinda, 2019)	Model Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Lokal di Kampung Wisata Warna Warni Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir	Penelitian Ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dilakukan atas kesadaran masyarakat sendiri agar terjadi perubahan sebagai upaya mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Kemudian keinginan untuk berubah ini dilakukan melalui program yang berupa pelatihan Tenun Songket, Kerajinan Anyaman Purun, dan Kelompok Olahan Ikan (KOI). Penelitian ini menggunakan Model Pelatihan Partisipatif.
3.	(Herawati, 2016)	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah Proses pemberdayaan sosial ekonomi melalui Proyek <i>International Fund for Agricultural Development (CCF-IFAD)</i> dengan Sosialisasi Program dan membentuk kelompok-kelompok masyarakat.

			Selain itu, masyarakat dapat merasakan manfaat kemandirian dalam hal kapasitas diri Nelayan mengelola modal, menerapkan teknologi dalam aktivitasnya, dan kerjasama kelompok nelayan.
4.	(Raden, 2015)	Pemberdayaan Keluarga Petani Rumput Laut Di Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang didapatkan ialah program pemberdayaan keluarga oleh pemerintah daerah didukung oleh potensi yang dimiliki pembudidaya rumput laut dan partisipasi masyarakat; dan terkendala dalam hal kurangnya tenaga teknis penyuluh (Sumber Daya Manusia) juga anggaran yang tersedia masih kurang memadai.
5.	(Halimah, 2013)	Intervensi Pemerintah Kabupaten Barru dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan Bagang Rambo	Metode Penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan ialah terbentuk pola sosial ekonomi dalam komunitas nelayan bagang Rambo yang digambarkan pada pola hubungan kekerabatan, pola hubungan persahabatan, pola hubungan punggawa sawi; pola hubungan tersebut ditujukan agar dapat menyelesaikan masalah

			yang terjadi pada masyarakat nelayan. Maka, pemerintah membuat program pemberdayaan masyarakat pesisir, pengadaan sarana dan prasarana alat tangkap dan pembangunan tempat pendaratan ikan, penelitian menemukan program tersebut tidak serta mampu memberdayakan masyarakat pesisir khususnya nelayan sawi.
--	--	--	--

Peneliti mendapatkan ada beberapa hasil penelitian seperti yang dicantumkan pada tabel di atas yang mengkaji tentang pemberdayaan. Penelitian terdahulu banyak mengkaji permasalahan pemberdayaan dengan menggunakan teori pemberdayaan dan perubahan sosial sebagai alat analisis dalam melakukan penelitian. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh (Gea, 2022) yang mencoba mengkaji permasalahan tentang pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan hampir mirip dengan kajian alber meiwani di tahun 2020 tentang pemberdayaan. Selain dari perbedaan tempat dan tahun penelitian, fokus kajian dan pendekatan teori yang digunakan pun berbeda sebagai bentuk inovatif peneliti dalam memperdalam kajian tentang pemberdayaan masyarakat. Perbedaan tersebut merujuk kepada pendekatan teori yang digunakan ialah melihat bagaimana dualitas yang terjadi antara agen dan

struktur dari teori strukturasi Anthony Giddens dalam melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat melalui program Lorong Wisata.

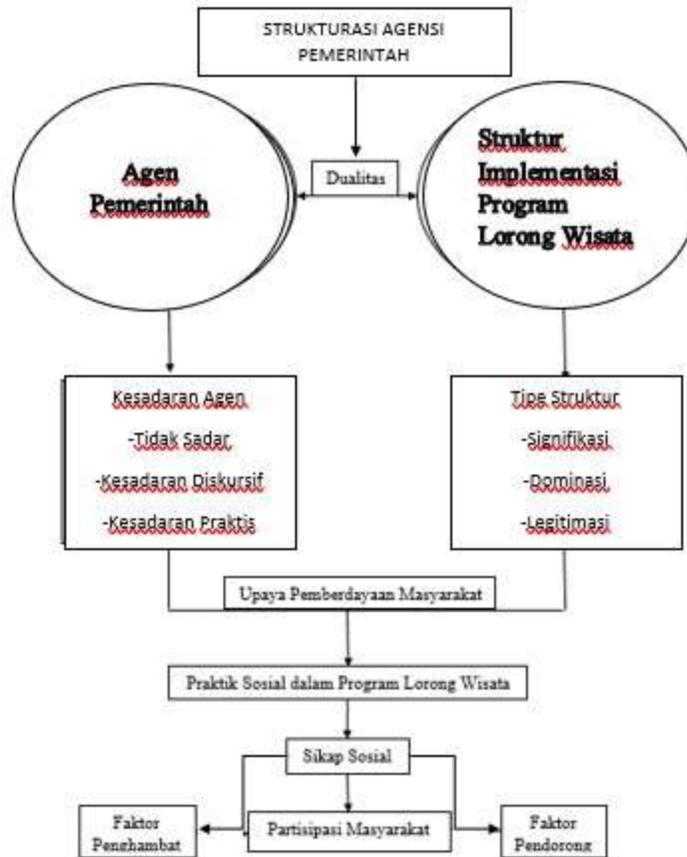
2.7 Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada Struktur Agensi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lorong Wisata di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Praktik sosial dalam program ini bertitik pada upaya yang dilakukan agen melalui struktur yang ada untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, Program Lorong Wisata jelas berada pada pihak-pihak yang terkait, dan dipadukan dengan bentuk praktik sosial dalam Program ini. Teori strukturasi Anthony Giddens digunakan untuk mengkaji penelitian ini agar kita dapat menelusuri bagaimana upaya agen melalui kesadaran yang dimilikinya dan struktur dengan beberapa tipe struktur yang dimiliki agen yang terpola dalam lintas ruang dan waktu.

Alur pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari pemberdayaan dengan bentuk dualitas dari Agen dan Struktur yang terlintas dalam ruang dan waktu menjadi sebuah praktik sosial. Agen dalam penelitian ini ialah mereka yang diberi kekuasaan oleh Walikota makassar dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata dan merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar. Agen dalam melakukan praktik sosial dipengaruhi oleh kesadaran yang dimilikinya, ada agen yang tak sadar, ada juga agen sadar mengenai tujuan melakukan suatu praktik sosial. Kesadaran agen terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, ada yang kesadarannya hanya bersifat praktis (menjalankan sesuatu praktik sosial karena sudah menjadi suatu

rutinitas melintasi ruang dan waktu), ada pula yang mencapai kesadaran diskursif (mengerti dan mampu merasionalkan alasan dalam melakukan suatu praktik sosial tertentu). Praktik Sosial Agen dalam program Lorong Wisata ini memiliki suatu *rules* (aturan) dan *resources* (sumber daya) disebut sebagai struktur yang mempengaruhi dan dapat dipengaruhi agen dalam melakukan suatu praktik sosial.

Fokus penelitian akan mencari tahu upaya pemberdayaan terhadap masyarakat melalui program Lorong Wisata ini melalui praktik pemberdayaan dari dualitas agen dan struktur, lalu akan timbul sikap sosial masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau tidak, peneliti akan mencari informasi lebih lanjut mengenai hal itu, dan akan digolongkan sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Lorong wisata ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.8 Definisi Operasional

- a. Masyarakat yang dimaksud dalam Penelitian ini ialah sekelompok individu yang tinggal dan menetap di kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- b. Lorong Wisata yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Lorong di tengah permukiman masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan Walikota Makassar, Bapak Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dalam meningkatkan kebermanfaatan ruang sebagai tempat destinasi baru (dengan dipenuhi karya

mural dan warna-warni tembok yang meningkatkan keindahan) dan di setiap sisinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat menanam beberapa jenis komoditi yang bernilai ekonomis di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

- c. Pemberdayaan yang dimaksud penelitian ini ialah keterlibatan dalam proses perencanaan, implementasi, hingga pemanfaatan dari program Pembangunan Lorong Wisata.
- d. Struktur ialah seperangkat aturan dan sumber daya yang mempengaruhi dan dipengaruhi agen dalam melakukan suatu praktik sosial.
- e. Agen ialah orang-orang yang konkret dalam arus suatu tindakan dan peristiwa.